

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah memiliki peranan sebagai organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat dalam mengatur pemerintahannya sendiri. pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam mengatur maupun mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri.

Otonomi daerah kemudian direfleksikan dengan adanya suatu desentralisasi, dimana terdapat tiga hal penting yang mempengaruhi terlaksananya desentralisasi dengan baik yaitu adanya penyerahan sumber pendanaan, sumber daya manusia (SDM) dan perangkat fisik yang memadai guna mendukung pelaksanaan berbagai urusan yang diserahkan kepada daerah, termasuk dalam urusan pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat.

Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.<sup>1</sup> Sistem hampir selalu dibuat dari beberapa subsistem yang lebih kecil, setiap subsistem melakukan suatu fungsi khusus penting untuk mendukung sistem yang lebih besar. Sistem sebagai sebuah entitas yang terdiri

---

<sup>1</sup> Eti Rochaety, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017 ), hlm.4

dari bagian-bagian interaksi yang terkoordinasi untuk mencapai satu atau lebih tujuan umum.

Sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan oleh manajemen dalam organisasi untuk memberikan nilai tambah yang menghasilkan keunggulan kompetitif dan sebagai alat kontrol. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai pendukung yang sangat baik bagi organisasi dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Pada saat sistem informasi akuntansi terintegrasi dengan teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi tidak berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan *output* informasi yang dapat melemahkan kinerja organisasi. Keberhasilan sistem informasi suatu organisasi tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya dan pemanfaatan teknologi yang digunakan.

Laporan keuangan merupakan suatu daftar financial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode.<sup>2</sup> Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu standar penyusunan laporan keuangan milik pemerintah yang disusun dalam bentuk prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

---

<sup>2</sup> Lantip Susilowati, Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang. (Yogyakarta :Kalimedia, 2015), Hlm.35.

Penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mempunyai tujuan untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan respon positif dengan mengembangkan sebuah program aplikasi komputer yang diberi nama Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).<sup>3</sup>

Agar dapat mengikuti perkembangan yang ada dan tercapai tujuan suatu instansi Pemerintah maka perlu adanya suatu inovasi agar dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan Negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintah menuju pemerintah yang baik dan bersih. Perkembangan teknologi yang berkembang pesat merupakan salah satu faktor yang utama yang melatarbelakangi dikembangkannya suatu sistem yang berbasis komputer yang mengacu pada standart akuntansi Pemerintah (SAP), agar dapat memudahkan pengelolaan keungan pada instansi Pemerintahan daerah.

Sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan sebuah perusahaan. SIM yang baik dapat berkontribusi pada proses-proses perencanaan, pengendalian serta proses pengambilan keputusan seperti yang telah banyak dibahas Sutanta. SIM pada proses

---

<sup>3</sup> Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

perencanaan adalah berbentuk dukungan analitik dan persamaan model, input data berlandaskan pada data historis serta kemampuan memanipulasi data melalui teknik peramalan serta ekstrapolasi. SIM pada tahap pengendalian berkaitan dengan analisis perbedaan antara prestasi dengan standar yang ada.<sup>4</sup>

Sistem informasi manajemen menurut pandangan Islam adalah merupakan proses pengolahan data menjadi suatu informasi yang benar dan jujur berdasarkan Al-Quran dan Hadist untuk dapat digunakan membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena dasar etika ini maka keuangan bagi kebanyakan Muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam dalam transaksi finansial itu dipandang oleh banyak kalangan Muslim sebagai kewajiban Agamis. Kemampuan lembaga keuangan Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-sungguh memperhatikan restriksi-restriksi Agamis yang digariskan oleh Islam.<sup>5</sup>

Penerapan SIMDA pada organisasi sektor publik diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Sebagaimana disyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, informasi akuntansi harus memenuhi karakteristik kualitatif yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan meningkatnya kualitas informasi laporan keuangan tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

---

<sup>4</sup> Eti Rochaety, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017. Hlm.11

<sup>5</sup> Hamdi Agustin, *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN MENURUT PRESPEKTIF ISLAM*, Jurnal Tabarru, Vol. 1 No. 1, 2018.

pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya yang ada pada organisasi.

Praktik keuangan syariah telah dilakukan sejak zaman kejayaan Islam. Namun seiring melemahnya sistem khalifah, pada akhir abad ke-19, Dinasti ottonoman memperkenalkan sistem perbankan barat kepada dunia islam. Hal ini mendapatkan kritikan dari para ahli fikih bahwa sistem tersebut menyalahi aturan syariah mengenai riba, dan berujung pada keruntuhan kekhalifahan islam 1924. Sistem keuangan syariah bukan hanya mengenai larangan riba yang juga telah dilarang pada Agama samawi seperti di Agama Yahudi dan Kristen. Sistem ini juga mengatur mengenai larangan suap, larangan transaksi yang melibatkan barang haram, larangan menibun barang, dan larangan monopoli.

Tujuan dari Penerapan SIMDA di BPKD Kab.Blitar adalah untuk menghasilkan laporan yang berkualitas,akurat,efisien,ketepatan waktu dalam penyusunan,dapat diandalkan, serta mudah dalam penggunaanya.BPKAD di Kab.Blitar mulai menggunakan aplikasi SIMDA pada tahun 2008 yang didampingi oleh BPKP. Bentuk dari pemanfaatan teknologi dan informasi yaitu dengan diterapkannya aplikasi teknologi komputer sebagai salah satu alat bantu pada proses akuntansi. Saat ini pemerintah kota serta pemerintah kabupaten telah mengimplementasikan sistem informasi keuangan daerah yang disediakan oleh BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan khususnya produk dari (Deputi IV) yaitu Pengawasan Bidang Penyelenggaran Keuangan Daerah melalui pemanfaatan teknologi dan informasi yang terhubung langsung

dengan database. Aplikasi itu adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), suatu aplikasi komputer yang merupakan salah satu dari komponen Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang disediakan sebagai aplikasi pembantu Pemerintah Daerah pada sistem akuntansinya mulai dari menyelenggarakan hingga mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.<sup>6</sup>

Dalam implementasinya SIMDA pemerintah Kabupaten Blitar dalam proses pengelolaan keuangan daerahnya secara terintegrasi meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan. Proses penganggaran dapat berupa RKA, penjabaran APBD maupun perubahannya serta dokumen DPA, rancangan APBD. Proses penatausahaan seperti Surat Perintah Membayar, Surat Penyediaan Dana dan juga Surat Permintaan Pembayaran atau SPP, kemudian beserta register-register dan berbagai formulir pengendalian anggaran lainnya. Sedangkan untuk kegiatan akuntansi dan pelaporan berupa jurnal, laporan keuangan, buku bisa, perda pertanggungjawaban beserta penjabarannya dan laporan arus kas. Meskipun demikian ukuran keefektivan penggunaan SIMDA Keuangan sendiri masih belum banyak diketahui dengan pasti, sehingga akan menarik jika dapat dilakukan analisis mengenai hal tersebut guna memperoleh data terkait implementasi pelaporan keuangan dengan menggunakan SIMDA Keuangan.

Maka dari itu pemerintah mengembangkan suatu aplikasi sistem informasi manajemen daerah atau yang lebih dikenal dengan sebutan SIMDA.

---

<sup>6</sup> [www.BPKP.go.id](http://www.BPKP.go.id) Diakses pada 7 Mei 2019 pukul 20.13 WIB.

Dengan aplikasi ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM”**

#### **B. Fokus dan Pertanyaan peneliti**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti berfokus pada penerapan SIMDA pada BPKAD, penerapan SIMDA dalam perspektif islam, serta kendala dan solusi atas penerapan SIMDA pada BPKAD.

Berdasarkan fokus penereglitian tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem informasi manajemen daerah di BPKAD Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana penerapan sistem informasi manajemen daerah di BPKAD Kabupaten Blitar ditinjau dalam perspektif islam ?
3. Apa kendala penerapan sitem informasi manajemen daerah di BPKAD Kabupaten Blitar ?
4. Bagaimana solusi terhadap kendala penerapan sistem informasi manajemen daerah di BPKAD Kabupaten Blitar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem informasi manajemen daerah di BPKD Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui Penerapan Sistem informasi manajemen daerah di BPKD Kabupaten Blitar ditinjau dalam perspektif Islam.
3. Untuk menegetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi saat menerapkan Sistem informsi manajemen daerah di BPKD Kabupaten Blitar.
4. Untuk mencari solusi atas kendala yang dihadapi saat menerapkan Sistem informasi manajemen daerah di BPKD Kabupaten Blitar.

### **D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah**

Kemajuan teknologi informasi saat ini sangatlah pesat, tidak kecuali dengan perkembangan Sistem informasi manajemen. Saat ini sistem informasi manajemen merupakan suatu kebutuhan bagi pemerintah khususnya dalam mempermudah penganggaran dan pelaporan. Untuk itu peneliti ingin ingin menemukan solusi untuk kendala sistem informasi manajemen daerah agar lebih baik lagi.

Dengan adanya keterbatasan penelitian baik segi waktu, dana, tenaga, teori dan supaya bahasan masalah yang ada dalam rumusan masalah tidak keluar dari jalur pembahasan, maka diperlukan batasan dalam penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian yang hanya



fokus untuk menguji penerapan Sistem informasi manajemen daerah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pada tahun 2014-2017.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dengan tujuan yang telah disebutkan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk akedemis dan juga profesi dalam rangka mengkaji serta mengembangkannya.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan perbandingan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA).

#### b. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat memberikan gagasan tentang penerapan Sistem informasi manajemen daerah, kualitas laporan keuangan, dan Pemahaman Pengguna mengenai aplikasi sistem informasi manajemen daerah sebagai langkah perbaikan sistem yang lebih baik.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat sebagai bahan pembelajaran bagi penulis untuk menambah wawasan keilmuan dan mengembangkan potensi riset yang berkaitan dengan pemerintah daerah.

d. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan informasi mengenai Aplikasi SIMDA yang digunakan di BPKD Kabupaten Blitar.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan informasi dan ilmu pengetahuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkepentingan dan dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

## **F. Penegasan Istilah**

Untuk menjelaskan masalah yang akan dibahas dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan judul penelitian “Pengaruh penerapan Sitem informasi manajemen daerah dan Pemahaman Pengguna terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKD Kabupaten Blitar”, maka perlu adanya penegasan istilah secara konseptual dan konsep operasional.

Definisi konseptual dalam penelitian ini mencakup :

1. Peran

Peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial atau kedudukan. Artinya, ketika seseorang dapat melaksanakan kewajiban dan

mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran.

## 2. SIMDA

Secara umum, Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) merupakan suatu sistem yang dapat membantu manajemen di dalam pengumpulan data, pengolahan serta analisis evaluasi data dan menyajikan kedalam batas informasi yang bernilai dan akhirnya sampai pada pengambilan keputusan di mana informasi ini berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen.

Aplikasi Sistem informasi manajemen daerah yang dikembangkan oleh Badan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikenal dengan aplikasi SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya<sup>7</sup>

Aplikasi SIMDA ini merupakan aplikasi data base yang dibuat untuk tujuan mempermudah penyusunan laporan keuangan. Hal ini akan berdampak juga terhadap ketepatan waktu dalam penyelesaian laporan keuangan serta dapat mendorong dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Salah satu misi dalam penerapan SIMDA ialah meningkatkan kinerja pengelola keuangan di tiap-tiap SKPD dan menerapkan tata kelola

---

<sup>7</sup> [www.BPKP.go.id](http://www.BPKP.go.id) Diakses pada 7 Mei 2019 pukul 21.21 WIB.

pemerintah yang baik dan bersih, bebas dari segala tindakan yang menjurus kearah kolusi, korupsi dan nepotisme.<sup>8</sup>

### 3. Kualitas

Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu istilah ini banyak digunakan dalam bisnis, rekayasa, dan manufaktur dalam kaitannya dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.

### 4. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu daftar financial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode.<sup>9</sup> Laporan keuangan merupakan salah satu produk yang paling utama dari proses akuntansi, laporan keuangan terdiri atas 4 jenis laporan antara lain :

- a. Laporan laba rugi
- b. Neraca
- c. Laporan arus kas
- d. Laporan perubahan ekuitas<sup>10</sup>

### 5. Perspektif islam

Perspektif Islam adalah sudut pandang seorang peneliti kepada objek yang diteliti dengan diilhami oleh nilai-nilai Islam yang telah terkandung didalam Hadist dan Al-Qur'an.

---

<sup>8</sup> Yesi Indian Ariska dan Nia Indriasari, *Analisis Pengaruh Penggunaan Sistem Manajemen Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*, Jurnal Imiah Vol 12, No. 2, 2017.

<sup>9</sup> Lantip Susilowati, *Mahir Akuntansi ...*, Hlm.35.

<sup>10</sup> Lantip Susilowati, *Akuntansi dalam Praktek*, (Yogyakarta : Kalimedia, 2017), Hlm.49.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Penelitian ini berisi dalam lima BAB dengan perincian sebagai berikut :

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II KAJIAN PENELITIAN**

Pada bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan hipotesis penelitian.

### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian.

### **4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data pengujian hipotesis dan pembahasan.

### **5. BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan penelitian dan sarang-saran yang ditunjukkan penelitian kepada pihak yang bekepentingan terhadap objek penelitian.